

KONTRIBUSI PEMIKIRAN POLITIK DAN PENDIDIKAN KH WAHAB CHASBULLAH: SEBUAH ANALISIS HISTORI DAN FILOSOFIS

Mochamad Zaky Maulana¹

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia¹
Zakymaulanaa25@gmail.com¹

Khoirotul Idawati²

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia²
Khoirotul.idawati11@gmail.com²

Hanifuddin Mahadun³

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia³
Hanifuddin.magadun23@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah melalui pendekatan historis dan filosofis. Sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), pemikiran K.H. Wahab mencerminkan sintesis antara nilai-nilai Islam, tradisi lokal, dan semangat kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang pemikiran politik beliau, menganalisis gagasan politiknya, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap politik Islam di Indonesia. Melalui metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, seperti karya tulis, pidato, dan dokumen historis. Kontribusi terbesar K.H. Wahab adalah upayanya menjadikan NU sebagai organisasi yang mendukung nasionalisme melalui penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah tidak hanya berkontribusi pada pembentukan politik Islam di Indonesia, tetapi juga menjadi landasan penting untuk membangun politik kebangsaan yang damai dan inklusif.

Kata Kunci: nahdlatul ulama; pendidikan; politik; wahab chasbullah

ABSTRACT

This research examines the political thought of K.H. Wahab Chasbullah through historical and philosophical approaches. As one of the important figures in the history of Islam in Indonesia and the founder of Nahdlatul Ulama (NU), K.H. Wahab's thought reflects a synthesis between Islamic values, local traditions, and the spirit of nationality. This study aims to describe the background of his political thought, analyze his political ideas, and evaluate his contribution to Islamic politics in Indonesia. Through a qualitative research method based on literature study, data was collected

from various primary and secondary sources, such as written works, speeches, and historical documents. K.H. Wahab's greatest contribution was his effort to make NU an organization that supports nationalism through the acceptance of Pancasila as the basis of the state. This research concludes that the political thought of K.H. Wahab Chasbullah not only contributed to the formation of Islamic politics in Indonesia, but also became an important foundation for building peaceful and inclusive national politics.

Keywords: *education; nahdlatul ulama; politic; Wahab chasbullah*



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah perkembangan politik Islam di Indonesia. Sebagai pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, pemikiran dan kontribusinya tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga mencakup aspek sosial-politik yang luas. Di tengah pergulatan politik Indonesia, khususnya pada masa pra-kemerdekaan dan awal pembentukan negara, K.H. Wahab memainkan peran kunci dalam menentukan sikap politik umat Islam terhadap pemerintahan kolonial Belanda, pemerintahan Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia (Nasrullah & Rama, 2023).

Konteks politik di Indonesia selama kehidupan K.H. Wahab Chasbullah (1888–1971) sangat dinamis. Pada masa itu, Indonesia mengalami berbagai perubahan drastis, mulai dari era kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, hingga perjuangan kemerdekaan yang memuncak dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. K.H. Wahab menjadi salah satu tokoh yang mampu memadukan peran ulama dalam politik tanpa melepaskan identitas keagamaan. Dalam situasi politik yang penuh

dengan tantangan, K.H. Wahab berupaya memberikan pandangan yang moderat dan inklusif terhadap hubungan antara Islam dan kebangsaan, serta menawarkan solusi yang pragmatis untuk berbagai dilema politik yang muncul pada masanya (Ahmad, 2022).

Wahab Chasbullah sebagai salah satu ulama terkemuka di Indonesia, pemikiran politik beliau dipengaruhi oleh pengalamannya di dalam dan luar negeri. Pendidikan keagamaan yang ia terima, baik di pesantren dalam negeri maupun di Timur Tengah, memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan pemikiran Islam yang dinamis dan kontekstual. Dalam pandangannya, agama dan politik tidak boleh dipisahkan secara kaku. Justru, politik seharusnya menjadi instrumen untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan persatuan sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam. Pemikiran inilah yang kemudian mendorong beliau untuk mendirikan NU sebagai organisasi keagamaan yang sekaligus memiliki visi politik (Qudsiyah & Mahadun, 2023).

Dalam konteks historis, K.H. Wahab Chasbullah dikenal sebagai tokoh yang pragmatis dan berkomitmen terhadap gagasan kebangsaan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah peran beliau dalam

Muktamar NU tahun 1936, yang memutuskan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu tokoh penting dalam mengarahkan NU untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara pada masa perdebatan tentang bentuk negara Indonesia di awal kemerdekaan. Keputusan ini didasarkan pada pandangan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan bahkan dapat menjadi landasan untuk membangun negara yang pluralis dan inklusif (Herawati & Isana, 2023). Selain perannya dalam politik praktis, pemikiran politik K.H. Wahab juga memiliki dimensi filosofis yang signifikan. Beliau menekankan pentingnya nilai-nilai Islam yang moderat, seperti tasamuh (toleransi), tawassuth (jalan tengah), dan tawazun (keseimbangan) dalam kehidupan politik. Pandangan ini mencerminkan keinginan beliau untuk menjaga agar umat Islam tetap dapat berpartisipasi dalam politik tanpa terjebak dalam ekstremisme. Pemikiran ini juga berkontribusi terhadap sikap NU yang moderat dan inklusif dalam berbagai isu politik, termasuk isu-isu kebangsaan dan pluralisme (Kharismatunisa' & Darwis, 2021).

K.H. Wahab Chasbullah melihat pendidikan sebagai elemen penting dalam membangun umat yang kuat, tidak hanya secara spiritual tetapi juga dalam konteks kebangsaan. Pendidikan yang diterapkan di pesantren-pesantren yang beliau asuh memadukan nilai-nilai agama dengan kebangsaan. Pendidikan adalah jembatan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

serta proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mengembangkan kualitas dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Khairi & Hosna, 2024). Pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi good and smart. Ini artinya pendidikan tidak mementingkan aspek intelektualitas saja, menjadi anak yang pintar, cerdas dan memiliki prestasi akademik yang tinggi, namun juga menjadi orang yang baik, be good people or good person, yaitu menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik dan berkarakter (Hosna, 2018).

Pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah relevan dengan tantangan politik modern Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan kemunculan berbagai kelompok ekstremis, pemikiran politik yang moderat, inklusif, dan berbasis pada prinsip-prinsip keislaman yang beliau tawarkan dapat menjadi model bagi pembangunan politik yang lebih adil dan berkeadaban (Razi, 2020). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam mengkaji sejarah pemikiran politik Indonesia, tetapi juga memberikan perspektif baru untuk merumuskan politik kebangsaan yang berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang membahas pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah, khususnya dalam konteks historis dan filosofis. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mengenai bagaimana K.H. Wahab Chasbullah merumuskan pandangannya tentang peran umat Islam dalam politik serta bagaimana pemikirannya

dapat diintegrasikan dalam sistem politik modern. Di tengah meningkatnya tantangan terhadap demokrasi dan pluralisme di Indonesia, penelitian ini berkontribusi dalam menggali pemikiran-pemikiran yang relevan untuk menjaga stabilitas politik dan kerukunan umat beragama. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai dalam melestarikan warisan intelektual ulama Nusantara, yang memiliki pandangan progresif dalam mengintegrasikan agama dengan politik.

B. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik pada masa hidup K.H. Wahab Chasbullah, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai Islam moderat yang mendasari pemikiran beliau. Data diperoleh dari karya-karya asli K.H. Wahab Chasbullah, dokumen sejarah, dan literatur pendukung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Histori Pemikiran Politik KH Wahab Chasbullah

a. Dinamika Sosial-Politik pada Masa KH Wahab Chasbullah

KH Wahab Hasbullah (1888-1971) adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan seorang ulama kharismatik, pemikiran politik beliau dipengaruhi oleh situasi sosial-politik yang dinamis pada masa kolonial. Dalam periode ini, Indonesia berada

di bawah kendali kolonialisme Belanda, dengan kondisi sosial yang kompleks serta ketegangan antara tradisi lokal dan pengaruh modernisasi (Sonia, *et al.*, 2024). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kolonialisme dan situasi sosial Indonesia pada masa itu memengaruhi pemikiran politik KH Wahab Hasbullah, khususnya dalam perjuangan melawan penjajahan, kebangkitan kesadaran nasional, dan upaya menjaga tradisi Islam dalam konteks perubahan zaman.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Hindia Belanda mengalami perubahan besar akibat kebijakan kolonial. Pemerintah Belanda menerapkan Politik Etis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi melalui pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Namun, kebijakan ini justru memperkuat eksploitasi sumber daya lokal dan menciptakan kesenjangan sosial (Salma *et al.*, 2023). Diskriminasi sosial memperjelas stratifikasi antara elite pribumi, rakyat biasa, dan komunitas Eropa. Kebijakan ini juga memicu munculnya gerakan anti-kolonial seperti Sarekat Islam dan Boedi Oetomo. Islam, sebagai identitas mayoritas masyarakat pribumi, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. KH Wahab Hasbullah, yang hidup dalam konteks ini, menyaksikan langsung bagaimana eksploitasi kolonial berdampak pada kehidupan rakyat dan tradisi Islam yang terdesak oleh modernisasi barat (Muid *et al.*, 2024).

Situasi sosial Indonesia pada masa KH Wahab Hasbullah ditandai oleh urbanisasi, modernisasi, dan perubahan struktur masyarakat. Modernisasi yang dipaksakan oleh kolonial mengubah tatanan

sosial tradisional. Urbanisasi yang meningkat di Jawa menciptakan tantangan baru bagi masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya dan agama (Haq dan Rifai, 2018). Pendidikan modern yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial dan misi Kristen menjadi tantangan besar bagi pesantren sebagai pusat pendidikan Islam tradisional. Pluralitas masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, sering kali dimanfaatkan kolonial untuk memecah belah rakyat. KH Wahab Hasbullah menyadari pentingnya pendekatan inklusif untuk menyatukan rakyat tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman (Setiawan, 2017).

Pemikiran politik KH Wahab Hasbullah sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik tersebut. Dalam menghadapi kolonialisme, beliau memandang penjajahan tidak hanya sebagai ancaman politik tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Penjajahan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemerdekaan manusia dalam Islam. Oleh karena itu, KH Wahab Hasbullah mendorong kemandirian umat melalui organisasi seperti Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Ulama. Beliau menekankan pentingnya identitas Islam untuk melawan dominasi budaya Barat yang dibawa oleh kolonialisme (Man, 2018). Dalam bidang pendidikan, KH Wahab Hasbullah percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan rakyat dari kebodohan dan ketergantungan pada penjajah. Ia mendirikan madrasah yang menggabungkan kurikulum tradisional Islam dengan ilmu modern, sekaligus mereformasi pesantren agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan colonial (Ahmad, 2022).

Dalam politik, KH Wahab Hasbullah menggunakan pendekatan yang fleksibel. Meski menolak kolonialisme, beliau memahami pentingnya strategi politik yang pragmatis. Beliau mendorong dialog dengan pemerintah kolonial untuk mendapatkan ruang gerak bagi umat Islam, sembari tetap memobilisasi massa melalui NU untuk menolak kebijakan yang merugikan rakyat. KH Wahab Hasbullah mengorganisasi umat untuk bersatu dan memperjuangkan kepentingan bersama (Rahayu & Angriani, 2019).

Kolonialisme Belanda menciptakan tantangan besar yang memaksa KH Wahab Hasbullah untuk mengembangkan strategi perlawanan yang berorientasi pada pemberdayaan umat. Melalui pendidikan, penguatan tradisi Islam, dan mobilisasi politik, beliau tidak hanya berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan tetapi juga meletakkan dasar bagi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa. Pemikiran beliau yang berakar pada Islam dan keterbukaan terhadap perubahan tetap relevan sebagai inspirasi menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi (Awwaliyah, 2019).

b. Peran KH Wahab Chasbullah dalam Sejarah Perjuangan Nasional

KH Wahab Hasbullah adalah salah satu tokoh kunci dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia yang perannya tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, tetapi juga memiliki dampak signifikan di tingkat nasional dan internasional. Sebagai ulama kharismatik dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Wahab Hasbullah berkontribusi dalam membangun kesadaran politik umat Islam sekaligus memperkuat perjuangan melawan penjajahan. Di tingkat lokal, beliau

aktif mengorganisasi masyarakat melalui pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk membangun kemandirian umat. Pesantren menjadi pusat penguatan identitas keislaman sekaligus tempat menggembleng kader-kader pemimpin yang kelak berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Selain itu, melalui organisasi Nahdlatul Wathan, KH Wahab Hasbullah memobilisasi potensi masyarakat lokal dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk menghadapi tekanan kolonialisme (Rambe, 2018).

Di tingkat nasional, KH Wahab Hasbullah dikenal sebagai penggerak utama dalam konsolidasi politik umat Islam. Salah satu langkah penting yang beliau ambil adalah memelopori pembentukan Komite Hijaz pada tahun 1926. Komite ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam Indonesia dalam menghadapi kebijakan Kerajaan Saudi Arabia yang saat itu mengancam keberadaan tradisi Islam Sunni, termasuk praktik ziarah dan maulid (Nadia, 2017). Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan kepedulian KH Wahab Hasbullah terhadap kepentingan umat Islam Indonesia, tetapi juga menggambarkan strategi politik beliau yang berorientasi pada diplomasi dan dialog. Selain itu, beliau berperan aktif dalam mendukung upaya persatuan nasional, salah satunya dengan mendorong NU bergabung dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan kemudian Masyumi sebagai wadah politik umat Islam. KH Wahab Hasbullah juga mendukung penuh Resolusi Jihad yang dikeluarkan NU pada tahun 1945, yang memberikan landasan teologis bagi umat Islam untuk terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia

dari ancaman Belanda dalam agresi militer (Sayuti *et al.*, 2018).

Pada tingkat internasional, KH Wahab Hasbullah menunjukkan pandangan politik yang visioner dengan membangun jejaring antara umat Islam di Indonesia dan dunia Islam. Melalui Komite Hijaz, beliau menjalin komunikasi dengan ulama dan pemerintah di Timur Tengah untuk menyuarakan kepentingan umat Islam Indonesia. Diplomasi ini mencerminkan kesadaran beliau akan pentingnya posisi strategis umat Islam Indonesia di kancah global. Selain itu, pandangan beliau tentang pentingnya menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah di tengah arus modernisasi global menjadi salah satu kontribusi besar dalam memperkuat identitas keislaman yang moderat dan inklusif (Kusuma *et al.*, 2022).

Secara keseluruhan, peran KH Wahab Hasbullah dalam sejarah perjuangan nasional mencakup dimensi lokal, nasional, dan internasional yang saling terkait. Beliau tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga inspirasi bagi perjuangan umat Islam untuk meraih kemandirian dan martabat di tengah tekanan kolonialisme dan modernisasi. Pemikiran dan tindakan politiknya mencerminkan kepekaan terhadap dinamika lokal dan global, sekaligus menunjukkan strategi yang berakar pada nilai-nilai keislaman tanpa kehilangan relevansi terhadap perubahan zaman.

c. Transformasi Pemikiran Politik KH Wahab Chasbullah dalam Konteks Sejarah

KH Wahab Hasbullah adalah seorang ulama, pemikir, dan organisator yang pemikirannya mengalami transformasi

signifikan sepanjang hidupnya, seiring dengan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan hingga kemerdekaan. Sebagai seorang yang lahir pada tahun 1888 di lingkungan pesantren, pemikiran awal KH Wahab Hasbullah dipengaruhi oleh tradisi Islam yang kuat dan pendidikan berbasis pesantren. Pada masa mudanya, beliau mendalami ilmu agama di pesantren-pesantren terkemuka di Jawa dan melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Makkah. Pengalaman ini memperkuat akar tradisional keislamannya sekaligus memperkenalkan beliau pada pemikiran reformis yang berkembang di dunia Islam saat itu. Tantangan modernisasi, kolonialisme, dan tekanan global membawa KH Wahab Hasbullah pada kebutuhan untuk mengadaptasi ajaran Islam agar relevan dengan situasi zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya (Hidayah, 2023).

Pada tahap awal, pemikiran KH Wahab Hasbullah berfokus pada penguatan pendidikan Islam tradisional di tengah gempuran modernisasi yang dibawa oleh kolonialisme Belanda. Beliau melihat pentingnya pesantren sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan moral generasi muda. Namun, di saat yang sama, beliau menyadari perlunya inovasi agar pesantren mampu bersaing dengan pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Oleh karena itu, KH Wahab Hasbullah mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern dalam sistem pendidikan Islam. Madrasah yang beliau dirikan, seperti Madrasah Nahdlatul Wathan, menjadi contoh konkret dari upaya transformasi tersebut (Hamami, 2021).

Seiring berjalannya waktu, pemikiran KH Wahab Hasbullah semakin berkembang dengan memasukkan aspek sosial dan politik dalam perjuangan keislamannya. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme mulai tumbuh di Indonesia sebagai respons terhadap penindasan kolonial. KH Wahab Hasbullah tidak hanya mengukuhkan perannya sebagai ulama tradisional, tetapi juga menjadi penggerak dalam perjuangan nasional (Zainuri dan Syifa, 2021). Hal ini terlihat dari inisiatif beliau dalam mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926 sebagai respons terhadap tantangan eksternal, seperti kebijakan Kerajaan Saudi Arabia yang mengancam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, dan tantangan internal, seperti perpecahan di kalangan umat Islam Indonesia. Melalui NU, KH Wahab Hasbullah mengajarkan bahwa tradisi keislaman bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi modernitas tanpa harus menyerah pada tekanan budaya luar (Rahem, 2017).

Pemikiran KH Wahab Hasbullah juga mengalami transformasi signifikan pada masa menjelang dan setelah kemerdekaan Indonesia. Di tengah pergolakan politik dan sosial pada masa itu, beliau menegaskan pentingnya Islam sebagai bagian integral dari perjuangan nasional. Puncaknya adalah peran KH Wahab Hasbullah dalam mendukung dikeluarkannya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini memberikan landasan teologis bagi umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan Belanda. Dalam konteks ini, pemikiran beliau tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap agama, tetapi juga

tanggung jawab terhadap bangsa dan negara (Hubi et al., 2021).

Pada masa pasca-kemerdekaan, transformasi pemikiran KH Wahab Hasbullah semakin mengarah pada peran Islam dalam pembangunan nasional. Beliau menekankan pentingnya harmoni antara nilai-nilai agama dan pembangunan masyarakat modern. Dalam berbagai forum, KH Wahab Hasbullah mendorong NU untuk terus berkontribusi pada penguatan moral bangsa sekaligus bersikap adaptif terhadap perubahan zaman. Pandangannya yang moderat dan inklusif membuat beliau menjadi salah satu tokoh Islam yang mampu menjembatani tradisi dengan modernitas (Ahdar et al., 2020).

Secara keseluruhan, transformasi pemikiran KH Wahab Hasbullah mencerminkan kemampuan beliau untuk membaca situasi zamannya dengan cermat dan menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam yang relevan. Dari penguatan tradisi pesantren hingga keterlibatan aktif dalam perjuangan nasional, pemikiran beliau terus berkembang seiring dengan tantangan yang dihadapi umat Islam Indonesia. Transformasi ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas intelektualnya, tetapi juga komitmennya terhadap prinsip-prinsip keislaman yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Landasan Filosofis Pemikiran Politik KH Wahab Chasbullah

a. Epistemologi Pemikiran Politik KH Wahab Chasbullah; Integrasi Traisi, Nilai Agama, dan Kebangsaan

Epistemologi pemikiran K.H. Wahab Chasbullah berakar pada kombinasi antara ajaran Islam tradisional, yang dipelajari

melalui pesantren, dan pendekatan rasional yang berusaha menghubungkan nilai-nilai agama dengan realitas sosial-politik di Indonesia. Beliau mengadopsi metode tafsir, hadis, dan fikih yang bersumber dari madzhab Syafi'i, yang menjadi landasan penting dalam membangun kerangka berpikirnya (Sujarwanto & Putra, 2018). Sebagai seorang ulama, K.H. Wahab memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang diperoleh melalui dua sumber utama: wahyu dan akal. Dalam konteks ini, wahyu, berupa al-Qur'an dan hadis, menjadi dasar utama dalam membentuk pandangan hidup dan sistem nilai, sedangkan akal digunakan untuk menganalisis dan menyesuaikan ajaran agama dengan perkembangan zaman, sehingga tetap relevan dengan kondisi sosial Masyarakat (Rochim & Imawan, 2023).

Pemikiran K.H. Wahab juga didasarkan pada prinsip *taqlid* dan *ijtihad*, di mana beliau menghargai tradisi keilmuan pesantren yang bersifat konservatif namun tetap terbuka terhadap *ijtihad* yang bersifat kontekstual. Dalam hal ini, epistemologi beliau lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman, meskipun tetap berpegang pada sumber-sumber klasik. Epistemologi politik beliau berusaha menjembatani nilai-nilai Islam yang murni dengan kebutuhan praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Dainori, 2019). Dengan demikian, beliau memandang bahwa pemikiran politik harus didasarkan pada interpretasi yang tajam terhadap ajaran Islam, namun tetap memperhatikan dinamika sosial dan perkembangan politik di Indonesia, sehingga menghasilkan pemikiran yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif.

Selain itu, epistemologi K.H. Wahab juga sangat dipengaruhi oleh fiqh kebangsaan yang beliau rumuskan. Fiqh kebangsaan ini tidak hanya mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sosial, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan politik dan budaya Nusantara. Pemikiran beliau dalam hal ini mencerminkan sebuah epistemologi yang mengutamakan maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat), yang berfokus pada pencapaian masalah umum, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Melalui pendekatan ini, K.H. Wahab berusaha menggali pengetahuan yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan bangsa, dengan tetap mempertahankan keselarasan antara ajaran agama, moralitas, dan politik (Setyadi et al., 2022). Dengan demikian, landasan epistemologi pemikiran K.H. Wahab Chasbullah merupakan perpaduan antara teks agama yang murni dan kebutuhan sosial-politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia

b. Ontologi Pemikiran Politik KH Wahab Chasbullah; Keseimbangan Dunia dan Ukhrawi

Pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah berakar kuat pada konsep keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Dalam pandangannya, politik tidak hanya dipandang sebagai urusan duniawi semata, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip ini tercermin dalam penerimaan beliau terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yang menurutnya selaras dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan sosial, kemerdekaan, dan kesejahteraan rakyat (Gilang, 2018). Dalam konteks ini, politik

harus menjadi sarana untuk mewujudkan masalah umat dan menjaga keutuhan sosial dengan berlandaskan nilai-nilai agama, sekaligus memastikan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat.

K.H. Wahab juga mengajarkan pentingnya persatuan umat, baik dalam kerangka agama maupun kebangsaan. Beliau mengintegrasikan nilai *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama Muslim), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan), dan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan), yang semuanya membangun kerangka pemikiran politik yang inklusif. Dalam hal ini, politik Islam menurut K.H. Wahab bukanlah politik yang eksklusif dan sektarian, melainkan politik yang membuka ruang bagi perbedaan dan keberagaman, serta menekankan pada prinsip moderasi dan toleransi. Konsep keseimbangan duniawi dan ukhrawi ini membentuk pandangan K.H. Wahab mengenai bagaimana negara harus mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan mengutamakan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan sebagai bagian dari tanggung jawab agama (Muluk et al., 2023).

Konsep keseimbangan duniawi dan ukhrawi dalam pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah juga terwujud dalam komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagi beliau, kemerdekaan politik adalah langkah penting dalam memastikan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat, yang merupakan bagian dari penerapan prinsip maqasid al-shari'ah. Pemikiran politik ini menekankan pentingnya kebebasan dalam memilih dan menjalani kehidupan sesuai

dengan nilai-nilai Islam, namun dengan tetap mempertimbangkan realitas sosial yang ada (Husnan & Rasyidi, 2021). Dengan demikian, pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah dapat dilihat sebagai bentuk harmoni antara tuntutan duniawi yang berorientasi pada kemajuan sosial dan ekonomi, serta ukhrawi yang berfokus pada pencapaian ridha Allah dan kebahagiaan akhirat.

c. Aksiologi Pemikiran Politik KH Wahab Chasbullah

Aksiologi (Nilai-nilai yang mendasari tindakan politik beliau) pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah dapat dipahami sebagai kerangka nilai yang mendasari seluruh tindakan politiknya. Beliau menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam praktik politik. Menurut K.H. Wahab, tujuan utama dari politik adalah untuk mewujudkan maslahat umat, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (Bachtiar, 2022). Dengan demikian, aksiologi politik beliau tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan duniawi seperti kekuasaan atau kekayaan, tetapi lebih pada pencapaian nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada syariat Islam. Hal ini tercermin dalam keyakinannya bahwa politik adalah sarana untuk mencapai kebaikan sosial yang mendalam, termasuk dalam memperjuangkan kemerdekaan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

K.H. Wahab juga memiliki pandangan yang sangat menekankan pada pentingnya moralitas dalam politik. Bagi beliau, politik yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai agama dan moralitas akan cenderung menyimpang dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, beliau

mendorong agar setiap keputusan politik harus didasarkan pada pertimbangan moral yang kuat, yang tidak hanya memikirkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) menjadi dasar utama dalam tindakan politik beliau, di mana setiap kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan mencegah kerusakan dalam tatanan sosial (Sodikin et al., 2022).

Dalam konteks aksiologi politik K.H. Wahab, pentingnya persatuan dan kebangsaan juga menjadi nilai yang sangat fundamental. Beliau melihat kebangsaan sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam, dan menegaskan bahwa mencintai tanah air adalah manifestasi dari iman. Hal ini tercermin dalam konsep *hubbul wathan* minal iman (cinta tanah air bagian dari iman), yang menjadi dasar bagi perjuangan politiknya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Muhanimin, 2021). Politik bagi K.H. Wahab bukan hanya soal kekuasaan, tetapi lebih kepada bagaimana agama dan kebangsaan dapat dijalankan secara seimbang dan harmonis, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Aksiologi pemikiran politik beliau menunjukkan bahwa tindakan politik harus selalu berorientasi pada nilai-nilai moral dan agama yang membawa manfaat bagi umat manusia dan menjaga keutuhan bangsa (Lutfiani & Ashoumi, 2022).

Relevansi Pemikiran Politik KH Wahab Chasbullah Terhadap Tantangan Politik Kontemporer

Pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah memiliki relevansi yang mendalam dalam menghadapi tantangan politik kontemporer, khususnya dalam membangun demokrasi yang inklusif. Di tengah situasi politik yang seringkali terfragmentasi dan diliputi polarisasi, prinsip-prinsip moderasi dan inklusivitas yang beliau anut dapat menjadi panduan penting. K.H. Wahab mengajarkan bahwa politik harus berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moralitas yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan. Dalam konteks demokrasi, beliau menekankan pentingnya partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun status sosial. Demokrasi yang inklusif, menurut pemikiran beliau, adalah demokrasi yang mampu menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan dialog serta kolaborasi untuk mencapai tujuan Bersama (Lilawati & Mashari, 2017).

Selain itu, pemikiran K.H. Wahab tentang kebangsaan yang berlandaskan pada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah menawarkan solusi untuk merawat pluralisme dalam masyarakat yang majemuk. Beliau tidak hanya melihat keberagaman sebagai sebuah tantangan, tetapi sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dipelihara. Dalam konteks politik kontemporer yang sering kali diwarnai oleh ketegangan antar kelompok, nilai-nilai pluralisme yang diajarkan oleh K.H. Wahab memberikan landasan untuk menciptakan harmoni sosial. Prinsip-prinsip ini

mengingatkan kita bahwa meskipun ada perbedaan, persatuan dalam keberagaman adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan ketahanan bangsa (Rasid, 2022).

Relevansi lebih lanjut dari pemikiran K.H. Wahab Chasbullah dalam merawat keutuhan bangsa dapat dilihat dari penerimaan beliau terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pancasila sebagai ideologi negara yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sangat sejalan dengan prinsip-prinsip yang beliau ajarkan. Dalam merawat keutuhan bangsa, K.H. Wahab menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Politik yang berlandaskan pada cinta tanah air, sebagai manifestasi dari iman, mengajarkan bahwa menjaga keutuhan bangsa bukan hanya kewajiban politis, tetapi juga tanggung jawab moral dan religius. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan ancaman disintegrasi, pemikiran K.H. Wahab tentang kebangsaan yang inklusif dan berbasis pada nilai agama ini menjadi sangat relevan untuk memperkuat persatuan dan mendorong kemajuan bangsa (Setiawan, 2019).

Kontribusi Pemikiran KH Wahab Chasbullah terhadap Politik Islam Nusantara

Pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan politik Islam di Nusantara, terutama dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan realitas sosial-politik Indonesia. Sebagai tokoh utama dalam mendirikan Nahdlatul Ulama (NU), K.H. Wahab memanfaatkan pemikiran politik Islam untuk

memperjuangkan hak-hak umat Islam di Indonesia, sambil menjaga tradisi dan nilai-nilai lokal yang telah berkembang di Nusantara. Salah satu kontribusinya yang paling menonjol adalah pemikiran tentang fikih kebangsaan yang menekankan keseimbangan antara nilai agama dan identitas kebangsaan. Konsep ini memadukan ajaran Islam dengan semangat nasionalisme Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada kepentingan agama semata, tetapi juga memperhatikan keutuhan bangsa dan negara Indonesia (Sholihuddin & Jazil, 2021).

K.H. Wahab juga berperan dalam memperkenalkan konsep politik Islam yang moderat, yang berusaha menyeimbangkan antara ajaran Islam yang murni dengan kondisi sosial-politik yang ada di Indonesia. Beliau memandang bahwa politik harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, namun juga harus mengakomodasi kondisi lokal dan keberagaman yang ada di Nusantara. Dalam hal ini, beliau menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kesejahteraan, dan persatuan sebagai pilar utama dalam membangun politik Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia (Munandar & Susanti, 2024). Pemikiran ini berperan penting dalam menciptakan sebuah model politik Islam yang inklusif, yang tidak hanya menghormati perbedaan, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Selain itu, K.H. Wahab juga memberi kontribusi besar dalam memperjuangkan peran Islam dalam negara Indonesia pasca kemerdekaan. Beliau mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan

menegaskan bahwa Pancasila adalah alat yang dapat memperkuat persatuan bangsa (Saputra, 2019). Pemikiran K.H. Wahab tentang hubungan agama dan negara memberikan landasan bagi integrasi Islam dalam kerangka negara modern, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah ada di Nusantara (Farih, 2019). Dengan begitu, kontribusi pemikiran K.H. Wahab Chasbullah terhadap politik Islam Nusantara tidak hanya menguatkan posisi Islam dalam masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi kebangsaan Indonesia yang plural dan majemuk.

Kritik dan Evaluasi terhadap Pemikiran KH Wahab Chasbullah

Meskipun pemikiran politik K.H. Wahab Chasbullah banyak memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia, terutama dalam menciptakan integrasi antara ajaran Islam dan kebangsaan, beberapa kritik terhadap pemikirannya dapat diidentifikasi. Salah satu kritik yang muncul adalah terkait dengan interpretasi moderat yang beliau terapkan dalam menghadapi tantangan modernitas. Meskipun beliau berhasil menyatukan nilai-nilai Islam dengan konteks sosial-politik Nusantara, ada yang berpendapat bahwa pemikiran beliau masih terpengaruh oleh struktur sosial tradisional yang menghambat perubahan radikal yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Beberapa kalangan menganggap bahwa pemikiran K.H. Wahab kurang memberikan solusi konkret terhadap permasalahan struktural yang dihadapi umat Islam, seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam politik Islam kontemporer.

Evaluasi terhadap pemikiran K.H. Wahab Chasbullah juga menunjukkan bahwa meskipun beliau menekankan pentingnya persatuan dan kebangsaan dalam konteks keberagaman, penerapan prinsip inklusivitas dan pluralisme yang beliau tawarkan tidak selalu berhasil sepenuhnya dalam meredam konflik antar kelompok. Dalam situasi politik Indonesia saat ini, tantangan pluralisme semakin kompleks dengan munculnya radikalisme dan sektarianisme yang memanfaatkan nama agama untuk memecah belah bangsa. Walaupun K.H. Wahab telah mengajarkan pentingnya moderasi dan toleransi, penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks politik praktis masih menghadapi hambatan, terutama dengan semakin menguatnya gerakan-gerakan intoleran. Oleh karena itu, meskipun pemikiran beliau tetap relevan, masih diperlukan penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut agar dapat mengatasi tantangan politik kontemporer yang lebih dinamis dan kompleks.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa KH Wahab Chasbullah memberikan kontribusi signifikan dalam pendidikan dan politik Islam di Indonesia. Melalui modernisasi pendidikan pesantren dan konsep politik moderat, beliau berhasil memadukan nilai-nilai keislaman dengan kebangsaan. Pemikiran beliau yang moderat dan inklusif tetap relevan untuk menjawab tantangan politik kontemporer seperti pluralisme dan radikalisme. Oleh karena itu, pemikiran KH Wahab Chasbullah layak menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan Islam dan politik nasional yang inklusif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahdar-A., Halik, & Musyarif. (2020). Moderation and mainstream of pesantren/madrasah education. *Jurnal Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13(1), 14–37.
- Ahmad, J. (2022). Analisis keberhasilan resolusi jihad Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 4(1), 93–110.
- Awwaliyah, N. M. (2019). Pondok pesantren sebagai wadah moderasi Islam di era generasi milenial. *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 3(1), 36–62.
- Bachtiar, A. (2022). Masuk dan berkembangnya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia awal abad ke-20 dan pengaruhnya dalam bidang sosial, politik dan pendidikan. *Jurnal Disrasatuna*, 1(2), 84–97.
- Daironi. (2019). Kontroversi pemikiran hukum Ahmad Hassan dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Keislaman*, 7(1), 141–160.
- Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan Pancasila dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah wacana negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 1(1), 1–20.
- Gilang, M. I. (2018). Dasar negara atau Pancasila: Sikap politik Partai Nahdlatul Ulama dalam Majelis Konstituante. *Jurnal Candrasangkala*, 4(1), 49–69.

- Hamami, T. (2021). Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama education: Two main pillars of national education di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 307–330.
- Haq, M. I., & Rifai, I. A. (2018). Internet dalam bingkai dakwah organisasi Nahdlatul Ulama. *Journal of Chinese Philosophy*, 8(2), 109–116.
- Herawati, T., & Isana, W. (2023). Kiprah Abdul Wahab Chasbullah terhadap dialektika persatuan dan nasionalisme tahun 1908–1971. *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 13(1), 17–32.
- Hidayah, B. (2023). Kepemimpinan KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Hasbullah dan KH Bisri Syansuri dalam membentuk karakteristik kepemimpinan santri di Pondok Pesantren Jombang. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(2), 29–45.
- Hosna, R. (2018). Internalisasi nilai-nilai tasawuf dalam Sholawat Wahidiyah bagi pembentukan karakter mulia (Studi kasus di SMK Ihsanniat Rejoagung Ngoro Jombang). *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 67–90.
- Hubi, Z. B., Fahmi, R., Nadya, A., & Adhari, N. R. (2021). Peran pesantren sebagai implementasi community civics di Pesantren Nahdlatul Ulama. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 56–76.
- Husnan, A. B., & Rasyidi, A. H. (2021). Fikrah Nahdliyah dalam membentuk moral bangsa: Studi empiris di PWNU Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 55–79.
- Khairi, F. I., & Hosna, R. (2024). Peran kiai pondok pesantren dalam membentuk sikap istiqomah mengaji santri di Pondok Pesantren Faidlul Qur'an Bendungrejo. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(1), 181–186.
- Kharismatunisa, I., & Darwis, M. (2021). Nahdlatul Ulama dan perannya dalam menyebarkan nilai-nilai pendidikan Aswaja An-Nahdliyah pada masyarakat plural. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 141–163.
- Kusuma, A. J., Rahmawati, R., & Fathun, L. O. M. (2022). Model Islam inklusif di Indonesia sebagai kajian kritik terhadap 'Clash of Civilization' Samuel P. Huntington. *Journal of Political Issues*, 3(2), 62–76.
- Lilawati, E., & Mashari, F. (2017). Pengaruh kompetensi dosen dan keputusan kerja dosen terhadap kinerja dosen di Universitas KH A Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 3(1), 39–63.
- Lutfiani, & Ashoumi, H. (2022). Internalisasi nilai-nilai beragam melalui pembelajaran Aswaja dan implementasinya terhadap sikap anti-radikalisme mahasiswa. *Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 9(2), 1–26.
- Man, Y. L. (2018). Urgensi Nahdlatul Ulama dalam pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(2), 142–154.
- Muhaimin. (2021). Lirik Yaa Lal Wathan: Interpretasi karya Wahab Hasbullah dalam konstruksi nasionalisme siswa

- sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 12(1), 1–12.
- Muid, A., Albab, M. U., & Ibad, M. A. (2024). Pendidikan agama Islam pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam*, 1(1), 1–7.
- Muluk, M. S., Tambunan, R. W., & Suryanto, A. B. (2023). Nahdlatul Ulama dan trilogi ukhuwah: Rekonstruksi konsep spirit perdamaian dunia di era digital. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 54–70.
- Munandar, A., & Susanti, E. (2024). Kontribusi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Research*, 1(1), 123–136.
- Nadia, Z. (2017). Perilaku keagamaan komunitas Muslim di Indonesia (Pemahaman hadis dalam NU dan komunitas Salafi Wahabi di Indonesia). *Jurnal Living Hadis*, 2(1), 141–178.
- Nasrullah, N., Rama, B., & Achruh, A. (2023). Nahdlatul Ulama, tokoh dan kegiatannya dalam dunia pendidikan. *Jurnal Islampedia*, 2(1), 21–28.
- Qudsiyah, A., & Mahadun, H. (2023). Pendidikan kebangsaan perspektif K.H. Wahab Chasbullah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 149–167.
- Rahayu, S. S., & Angriani, R. (2019). Peran organisasi Islam dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Publikasi*, 1(1), 1–107.
- Rahem, Z. (2017). Gerakan progresif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjaga marwah pendidikan keislaman di Nusantara. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 1–9.
- Rambe, R. (2018). Gerakan ekonomi Islam pada era pra kemerdekaan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 529–553.
- Rochim, A., & Imawan, D. H. (2023). Kontribusi pemikiran Islam K.H. Wahab Chasbullah tentang konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia. *Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara*, 2(2), 124–142.
- Rosid, A. (2022). Relasi nasionalisme dan Islam dalam lirik syair Yaa Lal Wathan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(8), 949–960.
- Razi, A. F. (2020). Aktualisasi spirit Islam Nusantara dan Islam berkemajuan, dua instrumen penangkal arus radikalisme penegak negara demokrasi. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(2), 58–65.
- Salma, R., Dewi, R., Wulandari, L., & Putra, P. (2023). Pengaruh politik etis kolonial Belanda terhadap pertanian dan ekonomi lokal di Lampung. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6(2), 21–34.
- Saputra, I. (2019). Resolusi jihad: Nasionalisme kaum santri menuju Indonesia merdeka. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(1), 205–237.
- Sayuti, A., Wasino, & Sodiq, I. (2018). Dinamika politik Partai Nahdlatul Ulama di Semarang tahun 1952–1979. *Journal of Indonesian History*, 7(1), 1–11.
- Setiawan, E. (2017). Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang prinsip pendidikan Islam multikultural

- berwawasan keindonesiaan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 32–45.
- Setiawan, S. (2019). Gambaran Ahmad Dahlan dan Wahab Hasbullah dalam pendidikan Islam terhadap nasionalisme Indonesia. *Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2(1), 28–36.
- Setyazi, G., Subandi, & Abas, E. (2022). Pendidikan multikultural dalam bingkai pemikiran nasionalis religius. *Journal of Islamic Education*, 3(2), 191–208.
- Sodikin, A., Hasan, S., & Ni'am, A. U. (2022). Kaderisasi dai NU untuk meningkatkan kualitas keislaman dan kebangsaan di OKU Timur. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, 4(1), 1–7.
- Sujarwanto, E., & Putra, I. A. (2018). Investigasi keterampilan proses sains terintegrasi mahasiswa pendidikan fisika Universitas A Wahab Hasbullah. *Physics Education Journal*, 2(2), 79–85.
- Suratin, S. I., Prayugo, P., Yunida, H. I., Fakhurridha, H., & Fitrianas, D. (2024). Manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Unggulan KH Abdul Wahab Hasbullah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. *Research Journal of Islamic Education Management*, 7(2), 197–212.